

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaturan dalam hukum positif Indonesia dan perlunya pembaharuan pengaturan mengenai tindakan *Unlawful Killing* oleh oknum Aparat Kepolisian. Dengan itu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*) dalam hukum positif Indonesia, 2) Bagaimana kebijakan ke depan tentang Tindakan Pembunuhan di Luar Hukum (*Unlawful Killing*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Masalah batasan penggunaan kekuatan terkhusus penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Kapolri, namun untuk pengaturan pidana mengenai penyalahgunaan senjata api oleh Aparat Kepolisian yang menyebabkan terjadinya *Unlawful Killing* masih belum ada sehingga Majelis Hakim yang bertugas menangani kasus penyalahgunaan kekuatan dan senjata api oleh Aparat Kepolisian masih menggunakan pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP. 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait *Unlawful Killing* yang utamanya dilakukan oleh Aparat Kepolisian menjadi suatu hal yang penting dan perlu disegerakan karena merupakan tindakan yang menyalahi hak asasi manusia terkhusus hak tersangka dan prinsip keadilan, bahkan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana sehingga sudah tepat bahwa peraturan terkait *Unlawful Killing* sangat diperlukan, belum lagi seharusnya posisi dan jabatan pelaku sebagai Aparat Kepolisian menjadi aspek yang bisa membedakan pidananya dengan warga sipil dan memberatkan sanksi yang diberikan kepadanya. Dengan penelitian ini dapat disarankan untuk membentuk pengaturan pidana khusus terkait *Unlawful Killing*, memindahkan pengaturan mengenai penggunaan senjata api di Peraturan Kapolri menjadi Undang-Undang dengan kekuatan mengikat lebih, serta menambahkan unsur luar dalam pemeriksaan etik disiplin Kepolisian.

Kata kunci: *aparat kepolisian, hukum pidana, unlawful killing.*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the laws in Indonesian positive law and the need for regulatory reform in the case of unlawful killings conducted by dishonest police officers. The task at hand is twofold: 1) how is unlawful killing regulated in Indonesian positive law, and 2) how will unlawful killing be addressed in the future. The research methodology is normative legal research or library research. The research results show that: 1) The issue of restrictions on the use of force, especially regarding the use of firearms, has been regulated in the National Police Chief Regulation, but for criminal arrangements regarding the misuse of firearms by police officers that cause unlawful killings, however, there is still no criminal regulation regarding the misuse of firearms by police officers that causes Unlawful Killing, so the Panel of Judges in charge of handling cases of abuse of power and firearms by police officers still use the Criminal Code. 2) The formation of laws and regulations related to unlawful killing, which is primarily carried out by police officers, is important and needs to be hastened because it is an act that violates human rights, especially the rights of suspects and the principle of justice, even the principle of presumption of innocence in criminal procedure law, so it is appropriate that regulations related to unlawful killing are needed, not to mention that the position and position of. With this research, it is possible to propose special criminal policies for unlawful killing, convert the regulation regarding the use of firearms in the National Police Chief Regulation into a more binding regulation, and to include external elements in the ethical examination of police discipline.

Keywords: *criminal law, police officers, unlawful killing.*